



## Integrasi Nilai Kearifan Lokal *Nggahi Rawi Pahu* dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Dompu: Sebuah Kajian Cultural Governance

Gazali<sup>1)\*</sup>, Ahmad Muhasim<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

Correspondence: gazali@uinmataram.ac.id

### ABSTRAK

*Nggahi Rawi Pahu* merupakan falsafah kearifan lokal masyarakat Dompu yang mengandung prinsip keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan modern, nilai ini memiliki relevansi strategis sebagai landasan etis dalam tata kelola yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dompu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa internalisasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* telah muncul dalam budaya kerja aparatur, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, serta penguatan regulasi. Namun, sejumlah tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan anggaran, resistensi sebagian aparat, dan ketimpangan pelaksanaan antarwilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* berpotensi menjadi modal sosial dan etika pemerintahan apabila dilembagakan melalui kebijakan formal, pendidikan budaya, serta partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Nggahi Rawi Pahu*; Kearifan Lokal; Pemerintahan Daerah; Budaya Kerja; Pelayanan Publik; Dompu

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun identitas budaya dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai masyarakat. Dalam perspektif antropologi budaya, kearifan lokal dipahami sebagai sistem nilai, simbol, dan praktik yang diwariskan antargenerasi serta menjadi rujukan dalam membangun tatanan sosial (Koentjaraningrat, 2000). Di Kabupaten Dompu, falsafah *Nggahi Rawi Pahu* telah lama berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Secara harfiah berarti “berbicara disertai perbuatan”, nilai ini menekankan integritas, kejujuran, keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta tanggung jawab moral. Nilai tersebut membentuk standar etik yang digunakan masyarakat untuk menilai perilaku individu, termasuk para pemimpin dan aparatur pemerintahan.

Dalam kerangka governance modern, nilai seperti *Nggahi Rawi Pahu* memiliki fungsi strategis sebagai modal budaya yang memperkuat responsivitas pemerintah terhadap warganya. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance*, yang menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai fondasi dalam pengelolaan pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2015). Di Kabupaten Dompu, falsafah *Nggahi Rawi Pahu* diintegrasikan dalam Perbup Dompu Nomor 36 Tahun 2022 sebagai dasar etika birokrasi dan pelayanan publik. RPJMD Dompu 2021–2026 juga menekankan pelayanan transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui program “Dompu Melayani,” sehingga nilai budaya lokal berfungsi memperkuat praktik *good governance* daerah. Ketika nilai budaya lokal diintegrasikan ke dalam praktik pemerintahan, maka legitimasi pemerintah meningkat karena masyarakat merasakan kesesuaian antara tindakan pemerintah dan identitas nilai-nilai mereka. Dalam konteks Dompu, Pemerintah Kabupaten Dompu telah menjadikan *Nggahi Rawi Pahu* sebagai kerangka etis dalam kebijakan pembangunan pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Namun demikian, integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam tata kelola modern bukanlah proses yang sederhana. Modernisasi dan globalisasi telah mendorong birokrasi untuk bekerja secara lebih teknokratis,

berbasis digital, dan berorientasi pada efisiensi prosedural. Giddens menjelaskan bahwa modernitas menciptakan sistem sosial yang cenderung bersifat impersonal, dimana hubungan sosial diatur melalui struktur formal yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai emosional atau kultural masyarakat (Giddens, 1986). Modernisasi birokrasi sering kali menciptakan pola pelayanan yang impersonal dan prosedural. Namun, di Indonesia terdapat adaptasi budaya lokal dalam birokrasi modern, seperti penerapan nilai gotong royong dan musyawarah dalam digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah tidak hanya mengembangkan layanan digital, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal agar transformasi birokrasi tetap responsif terhadap kultur sosial masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa modernisasi administratif dapat berjalan berdampingan dengan nilai budaya lokal (Imelda et al., 2026). Dalam konteks ini, *Nggahi Rawi Pahu* harus mampu beradaptasi dengan tuntutan tata kelola modern tanpa kehilangan makna filosofisnya sebagai norma integritas sosial.

Modernisasi birokrasi cenderung menekankan rasionalitas dan efisiensi, namun sering kali mengabaikan dimensi humanisme yang justru merupakan inti dari kearifan lokal. Weber menekankan bahwa birokrasi modern bekerja berdasarkan aturan formal yang kaku, sehingga berpotensi mengurangi sentuhan etis dan emosional dalam pelayanan (Weber, 1978). Dalam kasus Dompus, tantangannya adalah bagaimana aparat dapat menjaga profesionalisme administratif tanpa menghilangkan nilai-nilai moral *Nggahi Rawi Pahu* yang menuntut kejujuran, kesantunan, dan kesungguhan dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal ke dalam pemerintahan perlu dilakukan secara strategis agar tidak hanya menjadi slogan budaya, tetapi termanifestasi dalam tindakan konkret aparat.

Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas governance. Penelitian Trimurni et al. tentang tata kelola pemerintahan desa pesisir di Batubara menemukan bahwa nilai budaya lokal seperti gotong royong dan musyawarah mampu memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan berbasis consensus (Trimurni et al., 2025). Selanjutnya, penelitian Nur Tinri mengenai integrasi nilai *Tudang Sipulung* dan *Siri' na Pacce* dalam pemerintahan desa menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi pedoman etis aparat dalam menjalankan pelayanan publik yang berintegritas, meskipun masih menghadapi tantangan modernisasi dan rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat (Tinri, 2025). Penelitian Laurens juga menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memperkuat identitas budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Laurens, 2025). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana nilai *Nggahi Rawi Pahu* diinternalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan di Kabupaten Dompus. Temuan lapangan menunjukkan bahwa nilai ini hadir dalam proses perencanaan pembangunan desa, pelayanan publik, kegiatan sosial-keagamaan, penegakan ketertiban sosial, pencegahan kriminalitas, hingga pengelolaan lingkungan. Misalnya, adanya program ketahanan pangan, pembangunan sarana sanitasi di setiap rumah, penguatan TPQ, jaga malam, serta kampanye anti-narkoba di desa-desa menunjukkan bagaimana nilai *Nggahi Rawi Pahu* menjadi dasar etis bagi aparat dalam melaksanakan program-program tersebut.

Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa efektivitas implementasi nilai ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain komitmen pemimpin, kualitas regulasi, kapasitas aparat, dan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *structuration* Giddens, yang menjelaskan bahwa perilaku aktor sosial dipengaruhi oleh interaksi antara struktur (aturan, norma, dan kekuasaan) dan agensi (kemauan dan tindakan individu) (Giddens, 1986). Dengan demikian, keberhasilan integrasi *Nggahi Rawi Pahu* tidak hanya bergantung pada nilai itu sendiri, tetapi juga pada struktur institusional dan kepemimpinan yang mendukungnya.

Dalam dimensi sosial, penelitian ini juga menyoroti bagaimana pemerintah Dompus berupaya menjaga relevansi nilai budaya di tengah perubahan sosial yang pesat. Beragam program yang dijalankan—pendidikan karakter berbasis budaya, musyawarah desa yang partisipatif, insentif bagi guru ngaji, kampanye kesehatan dan lingkungan, hingga pemberdayaan pemuda desa—menunjukkan adanya upaya aktif dari pemerintah untuk menginternalisasikan nilai budaya dalam kehidupan publik. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan gagasan

Habermas tentang ruang publik deliberatif, di mana nilai, aspirasi, dan tindakan dibicarakan dalam arena sosial secara terbuka demi membangun konsensus bersama (Habermas, 2015).

Dengan melihat fenomena implementasi ini, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana implementasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dompu, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Fokus ini penting untuk menilai sejauh mana nilai budaya dapat menjadi fondasi dalam memperkuat etika birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *cultural governance*, yaitu pendekatan yang menempatkan budaya sebagai sumber legitimasi, etika, dan mekanisme pengaturan dalam pemerintahan (Geertz, 1973; Lvi-strauss, 1966). Temuan ini memperkaya perspektif bahwa *governance* tidak hanya bertumpu pada regulasi formal dan struktur birokrasi, tetapi juga pada nilai-nilai budaya yang mengatur perilaku sosial secara informal namun kuat. *Nggahi Rawi Pahu* merupakan falsafah masyarakat Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang bermakna “kesesuaian antara ucapan dan tindakan.” Nilai ini menekankan kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan komitmen moral dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan. Dalam konteks birokrasi, *Nggahi Rawi Pahu* menjadi pedoman etis bagi aparatur agar tidak hanya menghasilkan janji administratif, tetapi juga merealisasikannya melalui pelayanan yang nyata kepada masyarakat. Karena itu, falsafah ini dipandang sebagai sumber kepercayaan publik sekaligus modal budaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Dompu dalam merancang kebijakan berbasis kearifan lokal. Ketika nilai budaya dijadikan bagian dari etika pemerintahan, maka tata kelola menjadi lebih manusiawi, dekat dengan masyarakat, dan berakar pada identitas lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Suchman bahwa legitimasi pemerintah meningkat ketika tindakan organisasi dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang diterima masyarakat (Suchman, 1995). Dengan demikian, implementasi *Nggahi Rawi Pahu* berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat moralitas birokrasi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.

Secara singkat, penelitian ini menegaskan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* bukan hanya pedoman moral, tetapi juga instrumen strategis dalam tata kelola publik. Nilai ini memberikan arah bagi pemerintah untuk bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Integrasi nilai budaya ke dalam birokrasi modern bukan hanya tentang pelestarian budaya, tetapi juga tentang penguatan kualitas pelayanan, harmonisasi hubungan pemerintah–masyarakat, dan penciptaan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkarakter.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial berdasarkan data lapangan secara naturalistik. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami implementasi nilai kearifan lokal *Nggahi Rawi Pahu* dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Dompu. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna tindakan dan pengalaman informan secara langsung dalam konteks sosial mereka (Bogdan & Biklen, 2007, p. 5). Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif ini membantu menyajikan realitas sebagaimana dipahami, dijalankan, dan dinarasikan para aparatur pemerintahan serta masyarakat terkait praktik nilai lokal tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif, yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang dibentuk melalui pengalaman dan interaksi aktor-aktor sosial. Creswell menegaskan bahwa pendekatan interpretatif berupaya memahami makna subjektif terhadap tindakan sosial, sehingga relevan ketika peneliti ingin menggali bagaimana aparatur memaknai dan menerjemahkan nilai budaya seperti *Nggahi Rawi Pahu* dalam kebijakan dan pelayanan publik (Creswell, 2014). Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung dalam tindakan para aktor pemerintahan sesuai konteks sosial–budayanya (Geertz, 1973).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan camat, kepala desa, sekretaris desa, aparatur pelayanan publik, tokoh adat, dan masyarakat penerima layanan. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan

fleksibilitas dalam penggalian perspektif informan (Kvale, 1996). Sehingga jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 11 narasumber yang terdiri dari Kadis Dukcapil Kab. Dompu, Kades Desa Kareke dan Sekdes, Kades Desa Lepade dan Sekdes, Camat Woja dan Camat Dompu. Observasi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku aparatur dan praktik pelayanan publik di desa maupun kecamatan, sesuai panduan observasi naturalistik sebagaimana dijelaskan oleh Patton (Patton, 2023). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Bupati, RPJMDes, laporan kecamatan, arsip Dukcapil, serta literatur ilmiah mengenai kearifan lokal dan governance, sebagaimana teknik analisis dokumen yang direkomendasikan Bowen (Bowen, 2009).

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, mengikuti langkah-langkah Braun dan Clarke, yaitu: (1) transkripsi dan pembacaan data secara berulang, (2) pemberian kode (coding) untuk mengidentifikasi pola terkait kejujuran, disiplin, pelayanan publik, tanggung jawab sosial, dan nilai budaya, (3) pengelompokan kategori menjadi tema utama terkait implementasi dan tantangan *Nggahi Rawi Pahu*, serta (4) interpretasi temuan berdasarkan teori kearifan lokal dan governance. Melalui analisis tematik, peneliti dapat memahami keterkaitan antara nilai budaya dan praktik pemerintahan secara sistematis, mendalam, dan kontekstual (Braun & Clarke, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai kearifan lokal *Nggahi Rawi Pahu* dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Dompu tercermin pada tiga ranah utama: (1) budaya kerja aparatur, (2) kebijakan dan pelayanan publik, dan (3) dinamika sosial masyarakat. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, konsistensi ucapan dan tindakan, serta etika pelayanan menjadi pedoman moral yang mulai terinternalisasi dalam perilaku maupun kebijakan pemerintahan. Dalam perspektif teori modal sosial, nilai ini berfungsi sebagai *trust generator* yang memperkuat hubungan negara-masyarakat (Fukuyama, 1996).

### Internalisasi Nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam Budaya Kerja Aparatur Tingkat Desa di Kabupaten Dompu

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam budaya kerja aparatur desa tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan terartikulasikan secara konkret dalam praktik tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada integritas, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat. Di Desa Manggeasi, nilai tersebut termanifestasi melalui berbagai program pembangunan sosial dan lingkungan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pengadaan alat pertanian, pembangunan infrastruktur jalan, dukungan pendidikan anak usia dini, serta penguatan ketahanan pangan melalui distribusi bibit dan ternak. Aktivitas kolektif seperti Jumat Bersih, poskamling, dan kampanye anti-narkoba memperlihatkan bahwa nilai “mengatakan dan melakukan” tidak hanya menjadi etos individu, tetapi telah terlembagakan dalam tindakan kolektif. Dalam perspektif antropologi simbolik, fenomena ini mencerminkan *cultural embeddedness*, yakni keterlekatannya nilai budaya dalam praktik keseharian institusi sosial, di mana kebijakan desa tidak semata administratif, tetapi juga merupakan ekspresi moral komunitas (Geertz, 1973).

Sementara itu, Desa Lepadi menunjukkan bentuk internalisasi yang lebih normatif dan sistemik melalui integrasi eksplisit nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam visi pembangunan desa. Penegasan visi “Aman, Sejahtera, dan Masyarakat Taat *Nggahi Rawi Pahu*” mengindikasikan bahwa nilai budaya telah bertransformasi menjadi kerangka epistemologis dalam perumusan kebijakan. Implementasi program seperti penyediaan sanitasi (SPAL dan MCK), dukungan terhadap institusi keagamaan melalui bantuan masjid dan insentif guru ngaji, serta penguatan keamanan sosial melalui poskamling dan edukasi anti-narkoba menunjukkan bahwa nilai budaya tidak hanya menjadi legitimasi simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai dasar normatif bagi tindakan pemerintahan. Dalam kerangka *cultural governance*, hal ini menegaskan bahwa nilai budaya dapat menjadi sumber legitimasi kekuasaan sekaligus instrumen pengarah kebijakan publik (Lvi-strauss, 1966).

Berbeda dengan itu, Desa Kareke menampilkan orientasi implementasi yang lebih pragmatis melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti SPAL, MCK, rabat gang, dan jalan tani, yang secara langsung menyangar kebutuhan fungsional masyarakat. Namun demikian, penguatan lembaga sosial seperti PKK, Karang Taruna, dan LPM, serta pemberian insentif kepada guru ngaji dan marbot masjid, menunjukkan bahwa dimensi moral dan religius tetap menjadi bagian integral dari praktik pemerintahan. Secara keseluruhan, ketiga

desa tersebut merepresentasikan pola internalisasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* yang beragam tetapi memiliki kesamaan dalam menempatkan tindakan nyata sebagai indikator utama integritas aparatur. Hal ini sejalan dengan konsep *ethic of responsibility* dalam birokrasi yang menekankan bahwa legitimasi tindakan aparatur tidak ditentukan oleh retorika normatif, melainkan oleh konsekuensi nyata dari kebijakan yang dihasilkan (Weber, 1978).

Praktik pemerintahan di Desa Kareke mencerminkan prinsip *ethic of responsibility* karena orientasi kebijakan tidak berhenti pada simbolisme normatif, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan SPAL, MCK, rabat gang, dan jalan tani menunjukkan bahwa aparatur desa memprioritaskan konsekuensi nyata dari kebijakan, terutama dalam peningkatan sanitasi, aksesibilitas ekonomi, dan kesejahteraan warga. Dalam perspektif Max Weber, *ethic of responsibility* menekankan bahwa legitimasi tindakan birokrasi diukur dari kemampuan aparatur mempertanggungjawabkan dampak sosial kebijakannya, bukan sekadar retorika moral. Penguatan PKK, Karang Taruna, LPM, serta insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid memperlihatkan bahwa pembangunan fisik di Desa Kareke tetap diimbangi dengan penguatan modal sosial dan moral masyarakat (Villiers, 2015). Dengan demikian, birokrasi desa tidak semata bergerak secara teknokratis, tetapi mengintegrasikan rasionalitas administratif dengan tanggung jawab sosial-kultural. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai *Nggahi Rawi Pahu* berfungsi sebagai etika praksis yang menuntut kesesuaian antara janji pemerintahan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

### Implementasi Nilai dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* pada level kecamatan dan kabupaten tidak hanya merepresentasikan keberlanjutan nilai budaya dalam ruang birokrasi modern, tetapi juga mengalami transformasi menjadi kerangka etis yang operasional dalam praktik pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Nilai yang secara filosofis menekankan keselarasan antara ucapan dan tindakan tersebut terbukti mampu berfungsi sebagai fondasi moral yang mengarahkan perilaku aparatur, sekaligus membentuk standar integritas kelembagaan. Dalam konteks ini, *Nggahi Rawi Pahu* tidak lagi sekadar menjadi simbol identitas kultural, melainkan menjadi instrumen normatif yang mengisi kekosongan etika dalam praktik birokrasi kontemporer.

Di Kecamatan Pajo, internalisasi nilai tersebut terlihat melalui strategi penguatan disiplin aparatur berbasis mekanisme *reward–punishment* yang diterapkan secara konsisten. Pegawai yang tidak disiplin dikenai sanksi, sementara pegawai teladan memperoleh penghargaan, bahkan dalam beberapa kasus berasal dari inisiatif pribadi camat. Praktik ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan tidak hanya dijalankan dalam kerangka administratif, tetapi juga dalam dimensi etis yang menekankan keteladanan. Dalam perspektif Denhardt dan Denhardt, hal ini mencerminkan *moral leadership*, yaitu kepemimpinan yang berakar pada nilai, integritas, dan konsistensi antara perkataan dan tindakan (Denhardt & Denhardt, 2015). Dengan demikian, *Nggahi Rawi Pahu* berfungsi sebagai mekanisme internal kontrol moral yang tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga membangun budaya kerja yang berbasis pada komitmen etis, bukan sekadar kepatuhan formal.

Lebih jauh, orientasi kebijakan Kecamatan Pajo yang mencakup edukasi lingkungan—seperti pencegahan penebangan liar, tambang ilegal, serta gerakan penanaman pohon produktif—menunjukkan bahwa nilai *Nggahi Rawi Pahu* juga mengalami perluasan ke dalam dimensi ekologis. Dalam konteks ini, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang melekat pada peran aparatur negara. Perspektif ini sejalan dengan konsep *local ecological wisdom* yang menempatkan kearifan lokal sebagai basis etis dalam pengelolaan lingkungan hidup (Rahmatiani, 2016). Dengan demikian, implementasi nilai budaya tidak hanya memperkuat tata kelola internal birokrasi, tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Kecamatan Dompu memperlihatkan pola implementasi yang lebih berorientasi pada isu sosial dan kesehatan masyarakat. Program seperti penertiban pajak aparatur sipil negara, sosialisasi pencegahan tuberkulosis, penanganan pernikahan dini, serta mitigasi kenakalan remaja menunjukkan bahwa nilai *Nggahi Rawi Pahu* dimaknai sebagai etika sosial yang menuntut kehadiran aktif pemerintah dalam mengatasi problem masyarakat. Dalam hal ini, integritas birokrasi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Pendekatan ini mencerminkan konsep *moral community* yang dikemukakan oleh Fukuyama, di mana kepercayaan sosial dan kohesi komunitas dibangun melalui internalisasi nilai bersama yang diwujudkan dalam tindakan kolektif (Fukuyama, 2014). Dengan demikian, *Nggahi Rawi Pahu* berfungsi sebagai jembatan antara nilai budaya dan tanggung jawab sosial negara.

Pada level yang lebih institusional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dompu menunjukkan bentuk implementasi yang paling sistematis dan terstruktur. Pelayanan administrasi yang dilakukan dalam waktu 1x24 jam, komitmen terhadap layanan bebas calo dan pungutan liar, transparansi prosedur, serta orientasi pada pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi menunjukkan bahwa nilai *Nggahi Rawi Pahu* telah terintegrasi dalam sistem pelayanan publik. Praktik ini mencerminkan prinsip-prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang tidak hanya hadir sebagai norma formal, tetapi diwujudkan dalam mekanisme pelayanan yang konkret dan terukur. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dukcapil sebagai lembaga yang “paling jujur” menunjukkan bahwa internalisasi nilai budaya dapat menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi public (Angraini et al., 2024).

Dalam perspektif teori korupsi, kondisi ini sejalan dengan pandangan Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi dapat diminimalisasi melalui pengurangan peluang penyalahgunaan wewenang, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan (Klitgaard, 2009). Dengan adanya sistem pelayanan yang terbuka dan terstandar, ruang untuk praktik korupsi menjadi semakin sempit. Oleh karena itu, implementasi *Nggahi Rawi Pahu* di Dukcapil tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi nilai moral, tetapi juga sebagai strategi institusional dalam mendorong reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* telah mengalami transformasi dari nilai kultural menjadi etika publik yang operasional dan adaptif terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan modern. Nilai ini tidak hanya memperkuat integritas individu aparatur, tetapi juga membentuk sistem pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan implementasi nilai ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar sebagai fondasi etis dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

### ***Nggahi Rawi Pahu* sebagai Modal Sosial dalam Pemerintahan**

*Nggahi Rawi Pahu* sebagai nilai budaya yang menekankan keselarasan antara ucapan dan tindakan berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat relasi pemerintah–masyarakat di Kabupaten Dompu. Modal sosial dalam konteks pemerintahan tidak hanya berupa jaringan sosial, tetapi juga nilai kepercayaan (trust), norma moral, dan ekspektasi bersama yang membentuk perilaku kolektif aparat dan masyarakat. Fukuyama menegaskan bahwa kepercayaan adalah “kapital moral” yang memungkinkan institusi berjalan efektif, karena masyarakat bersedia bekerja sama dan patuh ketika pemerintah menunjukkan integritas (Fukuyama, 1996, p. 26). Dalam konteks ini, *Nggahi Rawi Pahu* menjadi sumber legitimasi moral bagi aparatur; ketika ucapan aparat sejalan dengan tindakan nyata, reputasi integritas terbentuk, dan dari sanalah lahir kepercayaan publik.

Modal sosial berbasis budaya sebagaimana digerakkan oleh *Nggahi Rawi Pahu* menghasilkan tiga dampak penting: meningkatnya kepercayaan warga terhadap aparatur, menguatnya legitimasi pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai respons terhadap tekanan moral dan nilai etis komunitas. Bukti empiris menunjukkan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan Dukcapil yang cepat, transparan, dan bebas pungli. Kepercayaan ini memperkuat legitimasi pemerintah karena aparatur dinilai bekerja sesuai komitmen moral budaya lokal. Selain itu, kualitas pelayanan publik meningkat melalui program MCK, ketahanan pangan, posyandu, TPQ, dan kebersihan lingkungan yang dijalankan secara partisipatif bersama masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfina & Utama—yang menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi memperkuat hubungan horizontal antara masyarakat dan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika nilai budaya dijadikan pedoman etika, aparat cenderung bekerja lebih bertanggung jawab karena merasa diawasi oleh norma kolektif, bukan sekadar peraturan formal (Alfina & Utama, 2024). Hal ini menjelaskan mengapa aparatur yang menerapkan *Nggahi Rawi Pahu* dinilai “bermartabat” dan layak dipercaya.

Dalam perspektif teori legitimasi institusional, Suchman menjelaskan bahwa legitimasi muncul ketika tindakan institusi “dianggap sesuai dengan nilai, norma, dan kepercayaan yang diterima masyarakat”

(Suchman, 1995). Oleh karena itu, *Nggahi Rawi Pahu* memenuhi unsur legitimasi pragmatis (karena menguntungkan masyarakat melalui pelayanan jujur), legitimasi moral (karena mencerminkan nilai-nilai etis), dan legitimasi kognitif (karena dianggap sebagai bagian dari identitas Dompu). Birokrasi lokal yang menginternalisasi nilai budaya memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dibanding daerah yang hanya mengandalkan regulasi formal (Rothstein & Stolle, 2008).

Sebagai modal sosial, *Nggahi Rawi Pahu* juga dapat dikaitkan dengan konsep *cultural embedded governance*, yang mana nilai budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui internalisasi norma kolektif dalam perilaku aparatur (Irwan et al., 2020). Nilai budaya yang tertanam dalam struktur sosial bekerja layaknya *informal institution*, yaitu seperangkat aturan tak tertulis yang mengatur perilaku birokrasi (North, 1991). Dalam konteks Dompu, internalisasi *Nggahi Rawi Pahu* berperan sebagai pembatas moral terhadap penyalahgunaan wewenang: aparat tidak hanya takut pada sanksi hukum, tetapi juga pada sanksi sosial berupa hilangnya kehormatan budaya.

Secara kritis, modal sosial berbasis budaya hanya efektif apabila didukung oleh kepemimpinan moral, konsistensi kebijakan, dan sistem pengawasan yang jelas. Jika tidak, nilai budaya bisa disalahgunakan sebagai legitimasi simbolik tanpa praktik nyata—fenomena yang oleh Suchman disebut "legitimasi kosmetik" (Suchman, 1995, p. 574). Oleh karena itu, integrasi *Nggahi Rawi Pahu* harus selalu diikuti dengan penguatan kapasitas aparatur dan mekanisme akuntabilitas publik agar modal sosial tidak berubah menjadi retorika semata.

### Integrasi Nilai Lokal dengan Prinsip Good Governance

Implementasi *Nggahi Rawi Pahu* dalam pemerintahan Kabupaten Dompu menunjukkan kesesuaian langsung dengan prinsip *good governance*, terutama pada enam pilar utama: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, keadilan, dan partisipasi. Transparansi tercermin melalui pelayanan Dukcapil yang bebas calo dan pungli serta keterbukaan anggaran desa. Transparansi semacam ini berfungsi sebagai *institutional trust generator*, sebagaimana ditegaskan oleh Grimmelikhuijsen et al., yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Grimmelikhuijsen et al., 2013). Ketika masyarakat mengetahui proses pelayanan dan alokasi anggaran, ruang manipulasi berkurang, dan kesesuaian antara ucapan dan tindakan aparatur—inti *Nggahi Rawi Pahu*—menjadi semakin terlihat.

Akuntabilitas muncul melalui reward–punishment aparatur dan kepatuhan pajak PNS. Dalam perspektif governance, akuntabilitas berbasis nilai budaya lebih kuat daripada akuntabilitas berbasis aturan semata, karena ia bekerja melalui *social norms enforcement* (Ostrom, 1990, p. 34). Aparatur tidak hanya takut pada sanksi formal, tetapi juga pada sanksi moral apabila dianggap melanggar nilai *Nggahi Rawi Pahu*. Hal ini memperkuat disiplin positif dan integritas birokrasi. Pada sisi responsivitas, penyediaan layanan sosial seperti TPQ, posyandu, dan program ketahanan pangan menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebutuhan riil warga, bukan sekadar melaksanakan proyek administratif. Penelitian Brandsen & Honingh dalam jurnal *Public Management Review* menunjukkan bahwa ketika pemerintah beroperasi dengan pendekatan berbasis komunitas (*community-based governance*), responsivitas pelayanan meningkat secara signifikan karena kebijakan bersumber dari aspirasi masyarakat (Brandsen & Honingh, 2016).

Efektivitas pemerintahan juga meningkat ketika nilai budaya menjadi acuan tindakan aparatur. Program pembangunan desa yang berbasis kebutuhan riil warga memperlihatkan prinsip *output legitimacy* sebagaimana dijelaskan oleh Scharpf, yaitu legitimasi yang muncul dari kemampuan pemerintah menghasilkan hasil yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Scharpf, 2002, p. 11). Keadilan terlihat dari distribusi bantuan merata, pembangunan MCK setiap rumah, serta berbagai kegiatan yang memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Prinsip keadilan ini berkelindan dengan pendekatan *equity governance* dalam literatur internasional, yang menekankan akses setara terhadap pelayanan publik (Bovens & Zouridis, 2002). *Equity governance* merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan keadilan, pemerataan, dan akses setara terhadap pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan tertinggal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga memperoleh layanan yang adil, inklusif, dan sesuai kebutuhan sosialnya (Lee, 2021).

Partisipasi warga melalui musyawarah desa, kegiatan jaga malam, dan kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* mendorong bentuk *collaborative governance* yang kuat. Dalam studi

Ansell & Gash, kolaborasi antara warga dan pemerintah menciptakan *shared ownership* terhadap kebijakan, sehingga efektivitas implementasi meningkat (Ansell & Gash, 2008). Partisipasi semacam ini juga memperkuat struktur sosial lokal karena warga terlibat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi aktor aktif dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan.

Secara kritis, integrasi *Nggahi Rawi Pahu* dengan prinsip *governance modern* menunjukkan bahwa nilai budaya tidak hanya kompatibel dengan pendekatan administrasi publik kontemporer, tetapi juga dapat menjadi fondasi moral yang memperkuat efektivitas institusi. Nilai budaya lokal berfungsi sebagai *cultural governance mechanisms* yang mampu memperkuat koherensi sosial, mengurangi biaya pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, praktik di Dompu memperlihatkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya dibangun oleh regulasi formal, tetapi sangat ditopang oleh nilai budaya yang hidup, yang berfungsi sebagai etika publik serta panduan moral bagi aparatur dalam bertindak.

### ***Nggahi Rawi Pahu* dalam Perspektif Cultural Governance**

Pendekatan *cultural governance* memandang bahwa budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai sumber legitimasi, etika, dan arah kebijakan. Dalam perspektif ini, *Nggahi Rawi Pahu* mampu bekerja sebagai instrumen regulatif yang menata perilaku aparatur dan membentuk orientasi moral pemerintahan di Kabupaten Dompu. Nilai budaya yang menekankan integritas, keselarasan tindakan dan ucapan, serta tanggung jawab sosial menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang tidak mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan pada kekuatan norma kolektif. Studi Siahaan et al., menjelaskan bahwa *culturally embedded governance systems* meningkatkan efektivitas pemerintahan karena nilai budaya menyediakan landasan moral yang diakui oleh komunitas (Siahaan et al., 2025). Implementasi *Nggahi Rawi Pahu* dalam praktik pemerintahan Dompu memperlihatkan bahwa budaya dapat berfungsi sebagai *informal institution* yang mengarahkan perilaku aparatur secara konsisten.

Contoh konkret seperti pemberian insentif kepada guru ngaji, kampanye anti narkoba, penguatan lembaga sosial desa, dan pendidikan karakter berbasis lokal menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis, tetapi juga menempatkan nilai budaya sebagai kompas moral kebijakan publik. Program-program ini memperkuat fungsi *social cohesion*, yaitu terciptanya rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Sumada menyatakan bahwa kebijakan publik yang dibangun berlandaskan nilai budaya lokal mampu meningkatkan penerimaan sosial dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Sumada, 2017). Hal tersebut terlihat jelas dalam konteks Dompu, di mana nilai *Nggahi Rawi Pahu* menjadi landasan moral yang memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat.

Integrasi nilai budaya ke dalam kebijakan publik juga menciptakan pelayanan publik yang lebih humanis. Pemerintah tidak hanya menekankan efisiensi birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional dan kultural. Hal ini relevan dengan temuan Wagenaar dalam *Administrative Theory & Praxis*, yang menekankan bahwa pelayanan publik berbasis budaya menghasilkan interaksi yang lebih etis karena aparatur memahami bahwa tindakan mereka dinilai bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral oleh masyarakat (Wagenaar, 2014). Dengan demikian, *Nggahi Rawi Pahu* berfungsi sebagai *ethical infrastructure* yang mempengaruhi cara aparatur memaknai tugas dan tanggung jawabnya.

Secara kritis, *cultural governance* menunjukkan bahwa kebijakan yang selaras dengan budaya lokal memiliki daya transformasi yang lebih kuat dibanding kebijakan yang sepenuhnya teknokratis. Ketika pemerintah Dompu menerapkan pendekatan moral-kultural dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan pencegahan kriminalitas, maka pemerintah tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga membangun nilai. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan legitimate. Karenanya, *Nggahi Rawi Pahu* dapat dilihat sebagai model *cultural governance* yang bukan hanya relevan bagi Dompu, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain yang ingin mengintegrasikan nilai budaya ke dalam tata kelola modern.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai pembandingan, pendekatan *cultural governance* lebih efektif dibanding model teknokratis murni karena mampu membangun kepercayaan sosial dan legitimasi publik secara berkelanjutan. Studi di Bali tentang penerapan nilai Tri Hita Karana menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi dalam

institusi pemerintahan (Ardiana et al., 2026). Sementara itu, penelitian di Musi Rawas menemukan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik meningkatkan responsivitas dan partisipasi masyarakat dibanding sistem birokrasi formal semata (Iman et al., 2025). Temuan ini memperkuat bahwa pendekatan budaya memiliki daya transformasi lebih kuat karena bekerja melalui kesadaran moral dan kedekatan sosial, bukan hanya kontrol administratif.

### Tantangan Implementasi

Implementasi nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam tata kelola pemerintahan lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, kultural, dan institusional yang berpotensi menghambat efektivitas internalisasi nilai tersebut. Keterbatasan anggaran desa dan kecamatan menjadi kendala utama yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan program berbasis nilai. Dalam konteks ini, nilai budaya yang idealnya diwujudkan dalam tindakan konkret sering kali harus berkompromi dengan realitas fiskal yang terbatas, sehingga berpotensi mereduksi makna praksis *Nggahi Rawi Pahu* menjadi sekadar simbol normatif. Studi Andrews menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menghambat implementasi nilai etika dalam birokrasi lokal, terutama di negara berkembang (Andrews et al., 2017).

Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada figur pimpinan menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem birokrasi. Disiplin dan integritas aparatur sering kali bergantung pada gaya kepemimpinan camat atau kepala desa, sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan, konsistensi implementasi nilai menjadi rentan terganggu (Mujahidin & Kusuma, 2025). Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Schwarz et al. yang menunjukkan bahwa *ethical leadership* memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku organisasi, namun tanpa dukungan sistem yang kuat, nilai tersebut sulit dipertahankan secara berkelanjutan (Schwarz et al., 2025). Dengan demikian, *Nggahi Rawi Pahu* masih berada pada tahap personalisasi nilai, belum sepenuhnya mencapai tahap institusionalisasi.

Ketidakkonsistenan antarwilayah juga menjadi indikasi adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dan variasi dalam interpretasi nilai budaya. Beberapa desa mampu mengintegrasikan nilai lokal secara progresif dalam kebijakan publik, sementara desa lainnya masih terbatas pada pendekatan simbolik (Bisogno et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti kapasitas sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, dan dukungan masyarakat. Desentralisasi tanpa penguatan kapasitas lokal justru dapat memperlebar disparitas antarwilayah dalam kualitas tata kelola (Ibrahim, 2024).

Dalam konteks kebijakan daerah, desentralisasi memberikan kewenangan luas kepada desa dan kecamatan untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun, tanpa pemerataan kapasitas kelembagaan, desentralisasi dapat memunculkan kesenjangan tata kelola antarwilayah. Desa dengan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat yang kuat cenderung lebih berhasil mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kebijakan publik, sedangkan desa dengan kapasitas rendah hanya menerapkan nilai lokal secara simbolik. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hadiz yang menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia sering menghasilkan disparitas kualitas governance karena perbedaan kapasitas elite lokal dan institusi daerah (Hadiz, 2010). Selain itu, studi Aspinall dan Fealy menunjukkan bahwa otonomi daerah tanpa penguatan kontrol dan kapasitas administratif dapat memperkuat fragmentasi kebijakan lokal serta ketimpangan pelayanan public (Aspinall & Fealy, 2003).

Di sisi lain, modernisasi birokrasi yang cenderung teknokratis juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pendekatan berbasis prosedur, digitalisasi, dan standar kinerja sering kali mengabaikan dimensi humanis yang menjadi inti nilai budaya lokal. Dalam konteks ini, terjadi ketegangan antara rasionalitas instrumental birokrasi modern dan rasionalitas kultural yang berbasis nilai. Sebuah studi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan sering kali gagal mengakomodasi nilai lokal jika tidak diimbangi dengan pendekatan sosio-kultural yang adaptif (Cordella & Paletti, 2019).

Lebih lanjut, penetrasi budaya luar yang materialistis turut mengikis nilai kolektivitas dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi *Nggahi Rawi Pahu* (Hamzah et al., 2025). Orientasi pada keuntungan individual dan pragmatisme ekonomi berpotensi menggeser etos pelayanan publik menjadi lebih transaksional. Kondisi ini diperparah oleh potensi penyimpangan seperti nepotisme, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip integritas dan konsistensi moral yang terkandung dalam nilai tersebut (Mirayanti et al., 2025). Dalam

perspektif Klitgaard, praktik nepotisme muncul ketika terdapat kombinasi antara kekuasaan yang besar, diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (Klitgaard, 2009).

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. *Pertama*, diperlukan penguatan kapasitas fiskal dan inovasi pembiayaan berbasis kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan program. *Kedua*, nilai *Nggahi Rawi Pahu* perlu diinstitusionalisasikan dalam regulasi dan standar operasional agar tidak bergantung pada figur pemimpin. *Ketiga*, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berbasis nilai dan budaya lokal. *Keempat*, integrasi antara modernisasi birokrasi dan kearifan lokal harus dilakukan secara adaptif agar tidak terjadi disonansi nilai. *Kelima*, penguatan sistem pengawasan dan transparansi perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik nepotisme dan penyimpangan lainnya. Dengan demikian, *Nggahi Rawi Pahu* dapat berfungsi tidak hanya sebagai nilai kultural, tetapi juga sebagai fondasi etis yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal *Nggahi Rawi Pahu* memiliki peranan penting dalam membentuk karakter tata kelola pemerintahan Kabupaten Dompu, terutama karena nilai ini menekankan keselarasan antara ucapan dan tindakan, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai dasar moral aparatur. Implementasinya tampak nyata pada berbagai level pemerintahan—desa, kecamatan, hingga dinas kabupaten—melalui beragam program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan layanan keagamaan, ketahanan pangan, kesehatan, pembangunan MCK di setiap rumah, perbaikan jalan tani, serta penguatan lembaga sosial. Pada tingkat kecamatan dan kabupaten, nilai ini juga tercermin dalam penegakan disiplin pegawai, peningkatan kepatuhan pajak PNS, program pelestarian lingkungan, serta pelayanan administrasi publik yang cepat, transparan, dan bebas pungli sebagaimana dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Temuan ini mengonfirmasi bahwa *Nggahi Rawi Pahu* selaras dengan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, dan partisipasi, sehingga berkontribusi meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Meski demikian, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan pada gaya kepemimpinan tertentu, ketimpangan implementasi antarwilayah, serta tekanan modernisasi dan budaya luar yang kadang melemahkan nilai kolektivitas. Potensi masalah birokrasi seperti nepotisme turut menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan nilai moral ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Nggahi Rawi Pahu* memiliki potensi besar sebagai modal sosial dan etika pemerintahan yang dapat memperkuat moralitas publik, meningkatkan kualitas layanan, dan membawa pemerintahan Dompu menuju sistem tata kelola yang lebih manusiawi, inklusif, dan berakar pada identitas budaya lokal, sekaligus mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas.

## Daftar Pustaka

- Alfina, A., & Utama, A. A. G. S. (2024). Ethical Organizational Governance: Understanding and Applying Local Wisdom in Creating the Organizational Climate. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, 37, 79–87. <https://doi.org/10.55549/epess.861>
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action* (1st ed.). Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747482.001.0001>
- Anggraini, A., Apriliani, E., Sari, P. A., Danti, R. R., & Prasetyo, E. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Online Sobat Dukcapil Kota Tangerang. *Jurnal Publik*, 18(02), 110–118. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.361>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiana, P. A., Sujana, I. K., Natalia, S. A. P. D., & Yanthi, K. D. L. (2026). Tri Hita Karana: Balinese local wisdom and its role in the triumph over corruption. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 22(1), 127–148. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2023-0182>

- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Rossi, F. M., & Peña-Miguel, N. (2023). Sustainable development goals in public administrations: Enabling conditions in local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 89(4), 1223–1242. <https://doi.org/10.1177/00208523221146458>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education*. Pearson.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. (world). <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing Different Types of Coproduction: A Conceptual Analysis Based on the Classical Definitions. *Public Administration Review*, 76(3), 427–435. <https://doi.org/10.1111/puar.12465>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101409. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101409>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Fukuyama, F. (1996). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Simon and Schuster.
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Hutchison.
- Giddens, A. (1986). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Habermas, J. (2015). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. John Wiley & Sons.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hamzah, S., Azis, A., & Faradilla. (2025). ISLAM DAN BUDAYA LOKAL. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 13(02), 77–95. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v13i02.61677>
- Ibrahim, A. H. H. (2024). Decentralization and its impact on improving public services. *International Journal of Social Sciences*, 7(2), 45–53. <https://doi.org/10.21744/ijss.v7n2.2278>
- Iman, M. M., Alfitri, A., Thamrin, M. H., & Alamsyah, A. (2025). INTEGRATION OF NEW PUBLIC GOVERNANCE AND LOCAL WISDOM IN PUBLIC SERVICES AT THE SUB-DISTRICT LEVEL: A CASE STUDY OF MUSI RAWAS REGENCY. *Natapraja*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v13i1.83388>

- Imelda, C., Hasanuddin, H., & Waliadin, W. (2026). Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pelayanan Publik Digital: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(8), 1438–1445. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i8.712>
- Irwan, A. L., Naping, H., Yani, A. A., & Nassa, M. K. J. (2020). Local values of Buginese Culture in the practice of government organizations in Sinjai. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(1), 164–183. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i1.10397>
- Klitgaard, R. (2009). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. SAGE.
- Laurens, S. (2025). PUBLIC SERVICE INNOVATION BASED ON LOCAL WISDOM: A BEST PRACTICE STUDY IN REGIONAL AREAS. *JURNAL BADATI*, 8(2).
- Lee, Y. (2021). Government for Leaving No One Behind: Social Equity in Public Administration and Trust in Government. *Sage Open*, 11(3), 21582440211029227. <https://doi.org/10.1177/21582440211029227>
- Lvi-strauss, C. (1966). *The Savage Mind*. University of Chicago Press.
- Mirayanti, M., Mas'ud, M., Sinring, B., Ramlawati, R., Kahar, Abd., & Fiansi, F. (2025). The illusion of meritocracy: A critical analysis of open selection for senior leadership in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2484472. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2484472>
- Mujahidin, M., & Kusuma, F. K. (2025). Redesigning Bureaucracy as a Governmental Strategy for Enhancing Public Service Effectiveness. *Society*, 13(1), 803–817. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.766>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2023). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Rahmatiani, L. (2016). NILAI KEARIFAN LOKAL SUNDA SEBAGAI BASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.36805/civics.v1i1.30>
- Rothstein, B., & Stolle, D. (2008). The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust. *Comparative Politics*, 40(4), 441–459. <https://doi.org/10.5129/001041508X12911362383354>
- Scharpf, F. W. (2002). *Governing in Europe: Effective and Democratic?* Oxford University Press.
- Schwarz, G., Richter, U. H., Shirodkar, V., & Esho, E. (2025). Unethical Pro-Organizational Behavior and Employee Performance in Côte d'Ivoire: The Effects of Leader-Member Exchange and Affective Organizational Commitment. *International Journal of Public Administration*, 48(7), 431–445. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2367032>
- Siahaan, A., Silalahi, H. A., & Siregar, E. R. (2025). PENTINGNYA BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/10.61240/jmri.v3i1.99>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sumada, I. M. (2017). PERANAN KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v7i1.337>
- Tinri, M. D. N. (2025). Peran Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Kebijakan Publik Desa: Studi Fenomenologis Di Desa Moncongloe. *Reflection Journal*, 5(2), 809–821. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3656>

- Trimurni, F., Aisyah, D., Tambusay, M. D. E., & Sihombing, S. M. (2025). Peran Kearifan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pesisir (Studi Kasus di Desa Nenassiam, Kabupaten Batubara). *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 123–138. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v3i01.21023>
- Villiers, D. E. de. (2015). In search of an appropriate contemporary approach in Christian ethics: Max Weber's ethic of responsibility as resource. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 71(1), 8. <https://doi.org/10.4102/hts.v71i1.2948>
- Wagenaar, H. (2014). *Meaning in Action: Interpretation and Dialogue in Policy Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315702476>
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Univ of California Press.